

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, merasa wajib melaksanakan pembangunan di segala bidang. Salah satu diantaranya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia itu dapat dilaksanakan diantaranya melalui proses pendidikan. Namun demikian kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, menuntut lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutunya.

Tuntutan tersebut disikapi dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan mejadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar tujuan tersebut tercapai. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dalam upaya mencapai tujuan tersebut turut melibatkan masyarakat untuk secara aktif bergerak mengadakan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan tersebut. Pembaharuan itu antara lain menyangkut proses pengelolaan manajemen keuangan dan kurikulum tepatnya yang menyangkut bagaimana kurikulum dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar dengan harapan

bahwa pendidikan dapat diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. Pendidikan yang berhasil - yang banyak bergantung pada baiknya pengelolaan keuangan tepatnya keuangan sekolah - diharapkan dapat diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, menerapkan sistem terbuka dan multi makna. Hal ini penting diperhatikan agar terbangun kepercayaan pemberi dana untuk secara berkelanjutan membantu sekolah (Depdiknas 1999:97).

Agar tujuan tersebut dapat dicapai kepala sekolah seharusnya mampu mengatur administrasi keuangan dan menyusun RAPBS (Depdikbud 1983:5-143). Tugas ini amat berat karena menyangkut hal memilih dan mengelola, mengarahkan bendaharawan rutin / gaji, bendaharawan komite sekolah, bendahara koperasi, bendahara OSIS. Jika kepala sekolah salah memilih petugas dan salah mengatur dapat berakibat fatal. Oleh karena itu bendahara yang dipilih wajib orang sangat dipercaya, berkelakuan dan bermoral baik, dapat bekerja sama dan loyal terhadap atasan langsung, tidak pemabuk / sering lupa ingatan dan tidak pemain judi. Layaknya pengelolaan keuangan pendidikan secara umum, manajemen keuangan SMP seharusnya dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi secara transparan (terbuka) dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akuntabilitas (keadaan untuk dipertanggung jawabkan pada masyarakat) dan demokratis (UUSPN 20 Tahun 2003).

Kenyataannya, masalah manajemen keuangan ini berindikasi sangat tertutup, rumit dan peka untuk diulas. Hal ini dibenarkan Clark et al dalam

Formasi (2003:53). Menurutnya penggunaan biaya pendidikan di Indonesia diarahkan berdasarkan informasi yang kurang handal atau cenderung tertutup antar departemen yang terkait sehingga berakibat pada tidak adil (*in adequate*), cenderung terpilah-pilah (*fragmented*), tidak fleksibel dan tidak efisien. Di sisi lain masalah keuangan sangat peka dan terkait erat dengan kepercayaan (Depdiknas 2000:100). Akibat ketertutupan ini, terjadi penyimpangan, penyelewangan dan sulit untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Akibat selanjutnya adalah hilangnya donatur padahal masalah pembiayaan merupakan sarana vital bagi hidup matinya suatu organisasi (Burhanuddin 1994:54). Karena semua kebutuhan baik bidang personal, material, kesiswaan dan lain-lain akan mudah terpenuhi apabila suatu organisasi memiliki biaya yang cukup.

Untuk memperoleh biaya tersebut sekolah harus memiliki manajemen yang handal, terutama dalam pengelolaan keuangan yang berkenaan dengan pendidikan seperti pembiayaan terhadap guru, sarana dan prasarana, sumber belajar dan proses kegiatan belajar mengajar. Ini menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Tidak heran apabila ditemukan banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru, maupun pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran (Mulyasa 2004:193). Tentu saja hal ini dapat dimengerti mengingat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 dengan jelas dinyatakan bahwa sarana pendidikan selain gaji para pendidik dan

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun pada kenyataannya anggaran pendidikan hanya dialokasikan 4% - 7% saja (Waspada, 24 September 2004:14).

Hal lain yang tak kalah pentingnya diperhatikan sehubungan dengan manajemen keuangan sekolah ini adalah di satu daerah Kabupaten / Kota Keuangan sekolah berbeda-beda dari satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Tidak ada dasar acuan / patokan perhitungan besarnya dana / anggaran di setiap sekolah. Ada sekolah yang jumlah muridnya banyak dan sekolahnya besar tetapi anggarannya kecil, sebaliknya ada sekolah yang kecil tetapi anggarannya besar. Ada pula yang sekolahnya sama jumlah muridnya dan besarnya sama tetapi anggarannya berbeda. Begitu juga antara sekolah di satu Kabupaten / Kota dengan Kabupaten / Kota yang lainnya. Untuk Kabupaten / Kota yang daerahnya kaya anggaran sekolahnya besar, guru-gurunya mendapat insentif, serta THR. Tetapi bagi daerah yang miskin anggarannya kecil dan tidak pernah mendapat insentif, maupun THR. Hal ini disebabkan karena berlakunya desentralisasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 48 ayat 1 UU Sisdiknas Tahun 2003 secara tegas menyatakan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun untuk menentukan kebutuhan sekolah dalam pemberdayaan di era pembelajaran, penyelenggaraan pendidikan

(sekolah) harus bersifat demokratis. Rosyda (2004:17) mengindikasikan sekolah yang demokratis adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktek-praktek demokratis itu terlaksana, seperti melibatkan masyarakat (*stake holder* dan *user* sekolah) dalam membahas program-program sekolah dan proses daur pengambilan keputusan, juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggung jawabkan implementasinya kepada publik.

Namun pada pelaksanaannya banyak kepala sekolah yang bersifat tertutup dalam manajemen dana pembelajaran di sekolahnya dan takut diketahui orang lain (Waspada, 2004:6). Di sisi lain para pakar pendidikan secara gamblang menyebutkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia saat ini tergolong rendah. Banyak faktor penyebab, salah satu karena dana pendidikan yang sangat minim, dan banyaknya kebocoran-kebocoran pada pihak pimpinan dari penyelenggara pendidikan itu.

Seluruh paparan di atas menyebabkan penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana sesungguhnya manajemen keuangan sekolah diaplikasikan di sekolah-sekolah. Namun khusus untuk penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan pada bagaimana sekolah SMP Negeri 2 Sunggal, mengelola keuangan sekolah tersebut.

B. Masalah Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pertanyaan umum pada penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen keuangan sekolah SMP Negeri 2 Sunggal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikannya? Secara khusus penelitian dilakukan untuk mengetahui:

1. Bagaimana metode sekolah dalam mencari sumber-sumber dana di sekolah SMP Negeri 2 Sunggal dalam upaya peningkatan mutu pendidikan?
2. Bagaimana RAPBS direncanakan pada SMP Negeri 2 Sunggal agar diperoleh peningkatan mutu pendidikan?
3. Faktor-faktor dominan apa yang mengganggu pengelolaan keuangan sekolah SMP Negeri 2 Sunggal untuk meningkatkan mutu pendidikan?
4. Bagaimana pengawasan keuangan sekolah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sunggal?
5. Bagaimana dampak manajemen keuangan sekolah dalam meningkatkan mutu?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan sekolah SMP Negeri 2 Sunggal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Secara khusus bertujuan untuk mengetahui:

1. Metode pencarian sumber-sumber dana sekolah SMP Negeri 2 Sunggal dalam peningkatan mutu pendidikan.

2. Bagaimana RAPBS direncanakan pada SMP Negeri 2 Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
3. Faktor-faktor dominan yang mengganggu pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah SMP Negeri 2 Sunggal dalam peningkatan mutu pendidikan.
4. Bagaimana pengawasan keuangan sekolah dilaksanakan guna menghasilkan mutu pelajaran.
5. Untuk mengetahui dampak pengelolaan keuangan sekolah terhadap mutu pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Masukan bagi SMP Negeri 2 Sunggal khususnya, dan SMP-SMP lain umumnya dalam mengelola keuangan sekolah guna peningkatan mutu pendidikan.
2. Sebagai bahan masukan Dinas Pendidikan dalam memberi pengarahannya bagaimana melakukan pengelolaan keuangan sekolah dalam rangka peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar.
3. Bagi peneliti-peneliti lain, dapat dijadikan bahan acuan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan manajemen keuangan sekolah.